

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Status sosial merupakan salah satu aspek penting dalam dinamika kehidupan masyarakat yang berkaitan erat dengan pengakuan sosial, peran, serta prestise yang diberikan oleh masyarakat kepada individu berdasarkan kedudukan dan profesinya. Dalam konteks stratifikasi sosial, status sosial memainkan peran sentral dalam menentukan posisi seseorang dalam struktur masyarakat, baik secara ekonomi, budaya, maupun politik. Salah satu profesi yang sering dikaitkan dengan status sosial yang tinggi di Indonesia adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS).

PNS tidak hanya dipandang sebagai profesi yang memiliki kestabilan finansial karena mendapatkan gaji tetap, tunjangan, serta jaminan pensiun, tetapi juga sering diidentikkan dengan derajat kehormatan dan prestise tertentu di tengah masyarakat (Suryani & Rahayu, 2020). Hal ini membuat status PNS menjadi dambaan bagi banyak individu dan keluarga, bahkan menjadi simbol keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan. Profesi ini kerap kali dikaitkan dengan tingkat pendidikan tinggi, posisi strategis dalam pemerintahan, serta akses yang lebih luas terhadap sumber daya publik dan keputusan-keputusan sosial.

Sebaliknya, profesi di luar lingkup pemerintahan atau yang dikenal sebagai Non-PNS, seperti pekerja swasta, wiraswasta, petani, buruh, dan pekerja informal lainnya, meskipun berperan besar dalam mendukung perekonomian lokal dan nasional, kerap kali ditempatkan pada posisi sosial yang lebih rendah. Hal ini bukan semata-mata karena aspek penghasilan, tetapi lebih pada konstruksi sosial yang sudah terbentuk dalam waktu yang lama, di mana PNS dianggap lebih layak untuk dihormati dan dijadikan panutan dibandingkan profesi lainnya (Hidayat, 2020).

Fenomena ini tidak hanya terjadi secara nasional, tetapi juga terlihat secara nyata dalam skala lokal, salah satunya di Gampong Kuala Tripa, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten

Nagan Raya. Dalam kehidupan sosial masyarakat gampong ini, terdapat kecenderungan umum untuk memberikan penghormatan lebih kepada individu yang bekerja sebagai PNS. Tidak jarang, dalam kegiatan sosial, keagamaan, maupun adat, PNS diberi peran penting atau dianggap sebagai tokoh masyarakat. Bahkan dalam proses perjodohan, banyak orang tua yang lebih memilih menantu dari kalangan PNS karena dianggap memiliki masa depan yang lebih terjamin.

Dalam pengamatan awal peneliti di Gampong Kuala Tripa, terlihat bahwa masyarakat masih menempatkan status sebagai PNS sebagai cita-cita utama dalam pekerjaan. Banyak keluarga yang mengarahkan anak-anak mereka untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sejak dini, bahkan mengabaikan potensi lain di sektor non-formal yang sebenarnya memiliki prospek menjanjikan. Di sisi lain, meskipun tidak semua PNS hidup dalam kemewahan atau kestabilan, persepsi masyarakat tetap menunjukkan kecenderungan untuk mengagungkan status tersebut. Sebaliknya, masyarakat yang bekerja di sektor non-PNS seringkali tidak mendapatkan pengakuan sosial yang setara.

Profesi seperti petani, nelayan, pedagang kecil, atau buruh harian sering dipandang sebelah mata. Padahal, tidak sedikit dari mereka yang memiliki pendapatan yang cukup besar dan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, persepsi yang terbentuk di masyarakat cenderung tidak mempertimbangkan hal tersebut, melainkan lebih terfokus pada simbol status formal seperti jabatan PNS.

Pandangan seperti ini tentu memunculkan pertanyaan kritis: Apakah status sosial seseorang semata-mata ditentukan oleh profesinya? Apakah status sebagai PNS selalu lebih tinggi dibandingkan profesi lainnya dalam pandangan masyarakat? Atau adakah faktor lain seperti budaya, pengalaman kolektif, sejarah sosial, dan media yang turut mempengaruhi konstruksi sosial ini? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi dasar penting bagi dilakukannya penelitian ini.

Penelitian Sari & Ramadhani (2022) mengungkap bahwa persepsi masyarakat terhadap profesi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, pengalaman hidup kolektif, dan norma budaya lokal. Di beberapa komunitas, profesi PNS dianggap sebagai perpanjangan tangan kekuasaan negara, sehingga status ini tidak hanya membawa pengakuan finansial, tetapi juga simbol kekuasaan sosial yang dihormati. Sebaliknya, profesi non-PNS sering dianggap kurang memiliki nilai simbolik meskipun secara faktual memberikan kontribusi besar dalam kehidupan bermasyarakat.

Realitas ini menimbulkan kesenjangan sosial dalam bentuk perlakuan yang berbeda antara PNS dan Non-PNS. Dalam acara-acara formal, misalnya, sering terlihat adanya pembedaan tempat duduk, kesempatan berbicara, dan penghormatan yang diberikan. Tidak jarang pula, dalam distribusi bantuan sosial atau proyek pembangunan desa, individu dari kalangan PNS dianggap lebih layak untuk dilibatkan. Fenomena ini menandakan bahwa masyarakat masih membentuk perlakuan sosial berdasarkan status formal, bukan berdasarkan kualitas kontribusi nyata. Penelitian Rahman (2021) juga menunjukkan bahwa di banyak wilayah di Indonesia, masyarakat lebih menghormati profesi PNS dan menganggapnya sebagai simbol kesuksesan. Namun, hasil penelitiannya belum menggambarkan secara spesifik konteks lokal seperti di Gampong Kuala Tripa. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk melihat bagaimana persepsi masyarakat terhadap PNS dan Non-PNS terbentuk secara lokal, dan bagaimana hal tersebut memengaruhi dinamika sosial di tingkat desa.

Dengan adanya fenomena tersebut, maka menjadi penting untuk dilakukan kajian lebih dalam terkait bagaimana masyarakat membentuk persepsi terhadap status sosial PNS dan Non-PNS, serta sejauh mana hal tersebut berpengaruh terhadap perlakuan dalam kehidupan sosial. Pemahaman ini diharapkan dapat membuka ruang dialog yang lebih adil dan inklusif dalam menghargai semua profesi di masyarakat tanpa harus mengedepankan status formal semata.

Penelitian ini akan berupaya menjelaskan secara rinci tentang persepsi masyarakat terhadap status sosial PNS dan Non-PNS, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan perlakuan tersebut. Dengan pendekatan kualitatif yang menekankan pada pemahaman makna, pola pikir, dan pengalaman sosial, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang dinamika sosial yang terjadi di Gampong Kuala Tripa. Penelitian ini tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga memiliki kontribusi praktis bagi pembangunan masyarakat yang lebih adil dan setara dalam menghargai keberagaman profesi di era modern saat ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini akan berfokus pada bagaimana masyarakat di Gampong Kuala Tripa memandang status sosial antara PNS dan Non-PNS. Perbedaan status sosial ini dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, seperti interaksi masyarakat, tingkat penghormatan, serta kesempatan dalam pengambilan keputusan sosial. Oleh karena itu, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Gampong Kuala Tripa terhadap status sosial PNS dan non-PNS?
2. Apa saja faktor yang memengaruhi pandangan masyarakat terhadap PNS dan non-PNS?
3. Bagaimana perbedaan perlakuan masyarakat terhadap individu yang berstatus PNS dan non-PNS dalam kehidupan sosial.

1.3 Fokus Penelitian

Peneliti berfokus menganalisis secara mendalam terkait persoalan pandangan yang terjadi pada yang berstatus PNS dan Non PNS, khususnya di kawasan Gampong Kuala Tripa . Kajian ini akan menelusuri berbagai faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan perbedaan pandangan, baik yang berasal dari dalam diri Masyarakat maupun faktor eksternal

yang menyebabkan pandangan yang berbeda, selain itu peneliti juga ingin mengetahui strategi yang dilakukan oleh pihak masyarakat dalam menanggulangi perbedaan pandangan, baik dalam jangka pendek maupun jangka Panjang. Dan yang terakhir peneliti ingin mengetahui dan menganalisis bagaimana peran para pihak dalam melakukan kontrol sosial terhadap pandangan yang berbeda yang terjadi pada status sosialnya yang dilakukan selama ini.

Penelitian akan melibatkan studi kasus pada gampong Kuala tripa untuk memahami secara detail bagaimana ketiga masalah ini memengaruhi efektivitas pandangan sosial tersebut dan penanggulangan terhadap pandangan yang berbeda yang terjadi pada yang status Sosial PNS dan juga Non PNS di Gampong Kuala tripa.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan fokus penelitian yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Gampong Kuala Tripa terhadap status sosial PNS dan Non-PNS
2. Apa faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap PNS dan Non-PNS.
3. Menjelaskan bagaimana perbedaan perlakuan masyarakat terhadap individu yang berstatus PNS dan Non-PNS dalam kehidupan sosial.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta pengembangan ilmu sosial, khususnya bidang ilmu sosiologi. Penelitian ini juga diharapkan mampu membuka wawasan keilmuan yang lebih luas kepada pembaca dan peneliti selanjutnya untuk pengembangan disiplin ilmu.

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah harapan peneliti dapat memberikan pencerahan dan wawasan lebih mendalam terkait terjadinya pandangan masyarakat pada yang berstatus sosial PNS dan Non PNS yang terjadi di lapangan dan diharapkan menjadi referensi bagi para pemangku kebijakan dalam hal ini Dinas Pendidikan, Masyarakat, aparat desa dan pemangku kebijakan lainnya dalam menyelesaikan persoalan perbedaan pandangan yang terjadi serta bagi yang berstatus sosial dan masyarakat serta para pihak terkait agar lebih memahami persoalan pandangan sosial mereka yang terjadi pada status sosial.